

EFEKTIFITAS MODEL BLU-e PADA PENGUJIAN PERANGKAT KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN AGAM

Iqbal Mayly Bahri¹, Rizki Syafril²

Administrasi Publik, Universitas Negeri Padang^{1,2}

Email: maylyiqbal379@gmail.com

Keywords

Effectiveness, BLU-e Model, Motorized Vehicle Devices

Abstract

Development of Science and Technology (IPTEK), new innovations were introduced in the transportation sector, namely through the use of electronic Proof of Test Pass (BLU-e). This was done to support performance in improving the quality of service in the field of motor vehicle testing. This electronic test pass proof consisted of a Smartcard, Certificate, and Sticker. The advantages of the BLU-e system included; Data synchronization with an integrated Management Information System (SIM) from regions to cities, A. Inconsistent document quality, B. All of Indonesia could access test data, C. Transparency, effectiveness, and efficiency in providing assistance. However, in reality, the results of this study indicated that the implementation of the BLU-e model had been carried out but had not been effective. The model applied at the Agam Regency Transportation Agency had not met the expected goals. This could be seen through the data published by BPS on its official website regarding the number of road accidents, which actually continued to increase. This was still influenced by various factors, ranging from internal factors such as human resources that were not yet optimal and incomplete infrastructure, to external factors namely the community itself, who still chose to use the services of brokers and even avoided the PKB process altogether.

Efektifitas, Model BLU-e, Perangkat Kendaraan Bermotor

Dengan adanya Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), terdapat inovasi baru yang ditujukan pada bidang transportasi, yaitu dengan menggunakan Bukti Lulus Uji elektronik (BLU-e). Hal ini dilakukan untuk mendukung kinerja dalam meningkatkan mutu pelayanan pada bidang pengujian kendaraan bermotor. Bukti lulus uji elektronik ini terdiri dari Smartcard, Sertifikat, dan Stiker. Keunggulan Sistem BLU-e antara lain: - Sinkronisasi data dengan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang terintegrasi dari daerah hingga kota. A.kualitas dokumen tidak konsisten. B. Seluruh Indonesia dapat mengakses data uji. C. transparansi, efektifitas, dan efisiensi dalam pemberian bantuan. Namun pada kenyataannya, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi model BLU-e sudah dijalankan namun belum efektif, model yang diterapkan di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam ini belum mencapai ekspektasi yang diharapkan, hal ini dapat di lihat melalui data yang di publikasi oleh BPS di situs resminya terkait angka kecelakaan di jalan raya yang justru terus mengalami peningkatan. Hal ini masih di pengaruhi oleh berbagai faktor mulai dari internal seperti sumber daya manusia yang belum optimal dan

sarana prasarana yang belum lengkap, hingga faktor eksternal yaitu masyarakat sendiri yang belum memilih menggunakan jasa calo bahkan menghindari PKB itu sendiri.

1. PENDAHULUAN

Menurut Harbani (2007) pelayanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai “aktivitas seseorang, sekelompok atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan”. Masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti ini terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak “melayani” bukan yang dilayani. Hal ini menimbulkan dampak buruk terhadap perkembangan kualitas pelayanan yakni sering terlantarnya upaya peningkatan pelayanan dan kurang berkembangnya inovasi dalam pelayanan serta kurang terpacunya pemerintah daerah untuk memperbaiki kualitas pelayanan.

Sesuai dengan tujuan pengujian kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 pasal 2 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, yaitu sebagai berikut: a. Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan; b. Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandeng dan kereta tempelan di jalan; c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. (Permenhub No. 133 Tahun 2015).

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai permasalahan, diantaranya; mulai dari banyak pengguna kendaraan bermotor yang belum melek teknologi, pengguna kendaraan yang enggan menjalankan program PKB, pandangan masyarakat yang masih berfikir bahwa proses yang lama dan berbelit-belit, dan masih banyaknya angkutan tidak layak yang masih beroperasi dijalanan, hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri dimasyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia PM (Peraturan Menteri) 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pengertian dari pengujian bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa

bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, dalam rangka yang memuat persyaratan terhadap Nomor teknis dan layak jalan. Sebaliknya Uji Berkala merupakan suatu metode pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilakukan secara metodis terhadap setiap kendaraan bermotor, termasuk kendaraan gandengan dan tempelan yang dioperasikan di jalan raya.

Umumnya proses uji dilakukan dengan menggunakan peralatan yang kompleks yang memerlukan banyak waktu dan tenaga. Waktu yang diperlukan untuk rata-rata pengujian kendaraan bermotor adalah tiga puluh menit. Hal ini disebabkan oleh proses administrasi, teknis, dan hukum yang dilakukan secara manual dengan menggunakan banyak pengikat dan entri data lintas batas (Priyambodo, 2014).

Oleh karena itu, pemilik kendaraan yang melakukan uji rutin harus memastikan tetap terjaga hingga hasil akhir uji tersebut. Pada saat ini, inovasi dalam proses uji sangat diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan primer yang efektif, sederhana, cepat, dan transparan. Selanjutnya, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Banjar melakukan inovasi dengan mengembangkan sistem bernama BLUE (Bukti Lulus Uji Elektronik) yang terintegrasi dan tersinkronisasi dengan Departemen Perhubungan. Yang kemudian di ikuti oleh daerah lain termasuk provinsi sumatera barat.

Penggunaan pengujian elektronik kendaraan di beberapa lokasi telah dibahas oleh beberapa peneliti, antara lain Noor dan Noviana (2021), Putra, dan Yoga (2022). Menurut Noviana dan Noor (2021), sistem tanda tangan elektronik mencegah korupsi dokumen dan gambar. Untuk mendapatkan hasil sebagaimana dimaksud tanpa pengujian, jasa pungli digunakan (Septianti dan Prabawati, 2019). Hanya saja, tidak meratanya proses sosialisasi metode BLU-e dan sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan yang terbilang rendah mengakibatkan terjadinya kendal, khususnya di Kota Semarang yang menjadi lokasi penelitian.

Untuk daerah yang sekarang juga telah menerapkan pelayanan uji KIR model BLU-e ini adalah seperti sijunjung agam pasaman barat solok dan payakumbuh. Dalam pelaksanaannya aktual di lapangan tidak melulu sama dengan ekspektasi program ini di jalankan, dalam beberapa kasus ada beberapa pertimbangan baik dari faktor internal dan eksternal yang menyebabkan pihak pengguna layanan yakni masyarakat pada sebagian kecil menyebutkan bahwa pada metode uji KIR sebelumnya lebih baik, dikarenakan beberapa aspek seperti kurang pemahaman sistem digitalisasi oleh

masyarakat. Hal ini tentu masih sangat memungkinkan untuk ditingkatkan dengan berbagai macam cara, baik secara penyuluhan ataupun pemberian informasi secara langsung oleh petugas tentang bagaimana prinsip penggunaan model BLU-e KIR ini juga tidak terbilang sangat rumit untuk dipahami.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Menurut Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah (2023), penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dalam suatu setting tertentu yang ada dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari dengan tujuan untuk menyelidiki dan memahami fenomena: apa yang terjadi, mengapa hal itu terjadi, dan bagaimana kehidupan sebenarnya.

Penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak dari penerapan sistem model BLU-e pada pelayanan pengujian kendaraan bermotor, juga dampaknya terhadap pengurangan angka kecelakaan di jalan umum. Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan penelitian lapangan dan secara langsung melakukan wawancara terhadap narasumber terkait penelitian yakni petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Agam dan masyarakat yang berkepentingan terkait pengujian kendaraan bermotor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan umum

Dinas Perhubungan merupakan institusi yang menjabat sebagai Badan Koordinasi Wilayah Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dishub Kabupaten Agam dilengkapi dengan perangkat untuk memudahkan penerapan kebijakan berbasis transportasi di seluruh wilayah Kabupaten Agam.

Fungsi utama Dishub adalah merangkum undang-undang terkait perhubungan di wilayah kerja, undang-undang terkait teknologi perhubungan, prosedur administratif seperti perhubungan angkutan perizinan, serta evaluasi dan korespondensi mengenai undang-undang perhubungan. Karena fungsi bidang perhubungannya yang strategis, Dishub juga memungkinkan SDM berinteraksi dengan sekolah terkait transportasi lainnya, seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub secara berkala membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan.

Dinas Perhubungan kabupaten agam dalam fungsinya juga melakukan evaluasi dan dokumentasi catatan kerja Bidang Sarana dan Prasarana Perhubungan; pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana lalu lintas, pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum.

Dalam menjalankan fungsinya Dinas Perhubungan menerapkan program PKB dengan menggunakan model BLU-e yang merupakan update dari PKB konvensional yang masih menggunakan kertas yang di tempel di kaca depan kendaraan menjadi berbentuk smartcard. Yang mana penggunaan smartcard ini mempermudah kinerja petugas dinas perhubungan dalam melakukan control dan pengawasan terhadap kendaraan tak layak jalan guna meminimalisir kecelakaan di jalan umum dan meningkatkan rasa aman dan nyaman berkendara bagi pengguna kendaraan bermotor.

Temuan khusus

PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Agam

Pemeriksaan kendaraan bermotor (PKB) pertama di Raya Bukittinggi-Medan Km. 6 Gadut, Tilatang Kamang, kini sudah bisa melakukan pemeriksaan lanjutan. Sesuai dengan Akreditasi B yang telah ditetapkan sebelumnya, dari Direktorat Jenderal Departemen Integrasi Wilayah No: SKET-DRJD 1040/2021, Tentang Sertifikat Akreditasi Unit Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Gadut Kecamatan Tilatang Kamang. Kementerian Perhubungan (dahulu Kementerian Perhubungan dan Prasarana) mewajibkan seluruh kendaraan bermotor menjalani pemeriksaan tipe setiap pencacahan setiap tahun di UPUBKB yang terakreditasi. Pada saat melakukan wawancara kepada pak Afrizon membenarkan bahwa di DISHUB agam sudah melaksanakan penerapan pelayanan PKB model BLU-e KIR “di DISHUB agam E-KIR sudah berjalan 3 tahun sejak tahun 2021” (wawancara pada 29 Agustus 2024)

UPUBKB harus menjamin standar pelayanan yang tinggi. Sebagai contoh, UPUBKB berfungsi sebagai penjaga kewaspadaan pada saat proses uji berkala (KIR) kendaraan bermotor.

Jika sebelumnya Bukti Lulus Uji hanya tersedia dalam bentuk buku, maka pada tahun 2020 Bukti Lulus Uji Motor telah tersedia dalam bentuk baru yang disebut BLU-e atau Bukti Lulus Uji Elektronik.

Tidak setiap kendaraan bermotor yang wajib melakukan perawatan dan memenuhi syarat lulus uji atau laik jalan akan mendapat BLU-e ini.

Fakta BLU-e:

1. Bukti bahwa kendaraan lulus dalam uji atau layak jalan.
2. Buku ini sendiri terdiri dari dua tanda lulus uji berkemampuan QR Code, sebuah hologram dengan QR Code yang dipajang di kaca depan kendaraan, dan satu kartu pintar yang menggunakan teknologi NFC.

Kelebihan PKB model BLU-e dibanding model waterfall yang diterapkan sebelumnya :

1. satu set BLU-e berlaku untuk satu atau dua tahun pengujian dengan harga relatif yang berfluktuasi, serta lebih Aman dan Praktis, sistem anti pemalsuan dan pendataan, serta penilaian. Sementara itu KIR hanya berlaku selama periode 6 bulan.
2. Lebih Aman dan Praktis, anti pemalsuan dan sistem pengisian data serta pencetakan sertifikatnya terintegrasi dengan Secure Access Module (SAM)
3. Mudah Diakses, hasil uji bisa diketahui dengan melakukan scan pada QR Code atau menggunakan aplikasi BLU-e dari Playstore, tidak seperti KIR konvensional yang belum sepenuhnya terkomputerisasi.

Terhitung mulai tanggal 5 Januari 2024, Pemerintah Kabupaten Agam telah menggratiskan uji kendaraan bermotor. Layanan uji KIR gratis ini dilaksanakan setelah pemerintah pusat secara resmi mengumumkan retribusi kendaraan wajib uji kelayakan kendaraan bermotor. Pelayanan kir gratis ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan pusat dan daerah, disusul Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Provinsi dan Redistribusinya.

Uji KIR gratis ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Agam saja banyak digunakan di seluruh Indonesia untuk kendaraan uji KIR. Agar sistem KIR lebih mudah digunakan dan efisien, digunakan aplikasi yang dapat diterapkan pada semua jenis kendaran dengan motor, termasuk barang dan penumpang angkutan.

Visi, Misi serta struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Agam

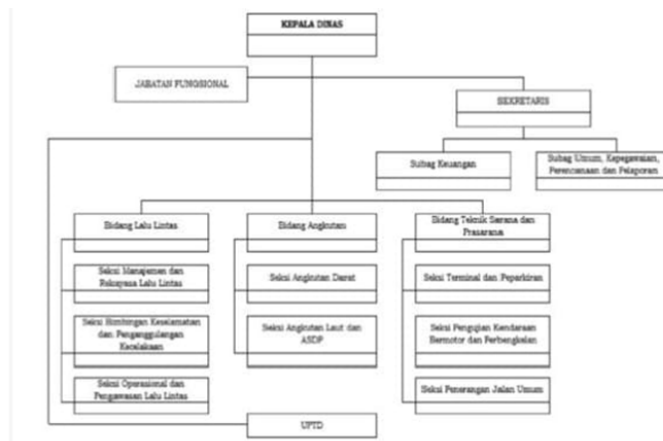
VISI yaitu :

" Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal dan terpadu "

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat mempunyai Misi yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan dan mengoptimalkan Sarana Prasarana Transportasi yang Berkelanjutan.
2. Mewujudkan Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Transportasi dengan cara meningkatkan pelayanan, fungsi forum koordinasi lalu lintas angkutan & peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan transportasi.

Struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, sebagai berikut :



Gambar : Struktur Organisasi Dishub Agam

Sumber : dishub agam

Ketika di wawancarai mengenai visi dan misi DISHUB terkait upaya mencapai visi dan misinya, apakah penerapan model BLU-e KIR ini mendukung dalam pencapaian target, bapak Afrizon menyebut “jelas berpengaruh, penggunaan E-KIR dalam PKB jauh lebih cepat dari KIR konvensional, kalau keadaan kondusif bisa hingga 2 kali lebih cepat”(wawancara pada 29 agustus 2024)

Hal ini di benarkan oleh pak Ajo selaku pengguna layanan PKB ketika di tanyakan mengenai proses pelayanan PKB yang pak Ajo terima“proses kami yang mau uji paling sebentar, 5 menit paling selesai, Cuma mengikuti instruksi dari petugas, lalu tinggal nunggu KIR dicetak” (wawancara 30 agustus 2024)

Sarana dan prasarana PKB

Dalam melaksanakan fungsinya dalam melayani proses pengujian kendaraan bermotor dishub bekerja dengan di bantu alat-alat yang berfungsi memastikan kelayakan sebuah kendaraan untuk digunakan di fasilitas jalan umum. Adapun alat yang digunakan dalam melaksanakan layanan PKB adalah sebagai berikut:

CO HC tester

Alat ini di gunakan untuk menguji kadar gas buang pada kendaraan bermesin bensin.



Gambar : CO HC tester

Sumber : peneliti

Smoke tester

Alat ini di guankan untuk menguji kadar gas buang pada kendaraan bermesin diesel.



Gambar : smoke tester

Sumber : peneliti

Pit lift

Alat ini digunakan untuk memeriksa bagian kolong dari kendaran bermotor.



Gambar : pit lift

Sumber : peneliti

Play detector

Alat ini untuk menguji ketimpangan pada kaki-kaki kendaraan bermotor (kendaraan roda 4 atau lebih).



Gambar : play detector

Sumber : peneliti

Sound level meter

Alat uji ini digunakan untuk menguji tingkat kebisingan yang di hasilkan oleh klakson kendaraan bermotor.



Gambar : sound level meter

Sumber : peneliti

Head light tester

Alat ini di gunakan untuk mengukur ketinggian, tingkat intensitas keterangan juga tingkat penyimpangan pada lampu utama kendaraan bermotor.



Gambar : head light tester

Sumber : peneliti

Side slipe tester

Alat ini menguji tingkat kelurusan pada ketimpangan ban depan kendaraan bermotor.

“alat ini berbeda dengan yang lain, kalau alat ini hanya di gunakan pada PKB mobil baru, uji PKB pertama, kalau yang lain di pakai untuk semua kendaraan” ucap pak Afrizon ketika diwawancari pada 30 agustus 2024.



Gambar :side slipe tester

Sumber : peneliti

Axle Load Brake Tester

Alat ini di gunakan untuk menguji berat kendaraan serta efisiensi penggunaan rem utama dan rem tangan.



Gambar : axle load brake tester

Sumber : peneliti

Speedometer Tester

Alat ini di gunakan untuk mengukur ketimpangan antara kecepatan di speedometer dengan kecepatan actual di jalanan.



Gambar: speedometer tester

Sumber : peneliti

Alur pengujian kendaraan kermotor model BLU-e

Bentuk pengujian Kendaraan Bermotor dengan sistem BLU-e memiliki alur yang beragam sebagaimana:

1. Pemilik kendaraan akan mendaftarkan kendaraannya, setelah itu dilakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang diwajibkan oleh petugas. Selanjutnya petugas loket pendaftaran memberikan kode billing dan peta pemeriksaan yang harus dibayar di kasir.

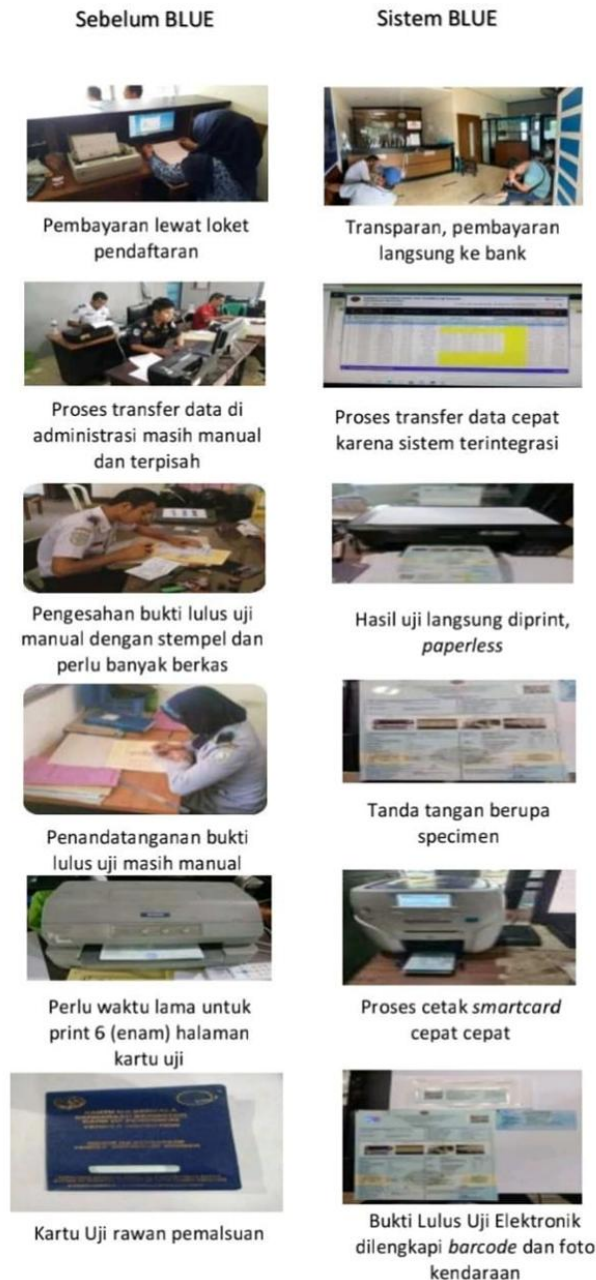
2. Setelah pembayaran, karyawan akan menggambar peta pemeriksaan dan supervisor akan memulai pemeriksaan bidang teknis dan pemeliharaan.
3. Proses pemeriksaan teknis dimulai dari penguji kendaraan bermotor menggunakan tablet untuk pengecekan kondisi fisik, dilanjutkan dengan dimensi kendaraan, klakson menggunakan sound level meter, dan alur ban. Selanjutnya proses pengambilan foto kendaraan dilakukan dengan menggunakan empat sisi: depan, kanan, kiri, dan belakang.
4. Selanjutnya pengukuran emisi gas gedung dilakukan sesuai dengan jenis sensor kendaraan, yaitu sensor bensin menggunakan CO HC Gas Analyzer dan sensor diesel menggunakan Smoke Tester. Hasil pengukuran dicatat dalam bentuk tablet.
5. Selanjutnya bagian bawah kendaraan diangkat menggunakan Pit Lift, dilanjutkan dengan pengecekan ketimpangan pada sistem kemudi menggunakan Play Detector
6. Selanjutnya dilakukan pengukuran intensitas lampu utama dan arah sudut lampu ke arah kanan dan kiri menggunakan Head Light Tester.
7. Kemudian dengan menggunakan Side Slip Tester, penyimpangan pada roda depan diperiksa
8. kemudian pemeriksaan menyeluruh, dilanjutkan dengan pemeriksaan menyeluruh pada rem utama dan rem tangan dengan menggunakan Axle Load Brake Tester.
9. Langkah terakhir adalah menggunakan speedometer tester untuk menguji kecepatan kendaraan. Hasil dari setiap pengujian, baik berhasil maupun tidak, akan otomatis dicatat oleh penguji kendaraan bermotor ke dalam formulir yang ada pada aplikasi uji berkala.
10. Hasil pengujian pada aplikasi otomatis diterima oleh petugas administrasi dan selanjutnya untuk kendaraan yang dinyatakan lulus uji akan diproses bukti lulus uji elektroniknya yang berupa smartcard, sertifikat hasil uji dan stiker hasil uji (Gambar 18(12)). Data kendaraan yang diuji setiap harinya akan disinkronkan langsung kepada Kementerian Perhubungan lewat aplikasi sinkronisasi uji berkala milik Kementerian Perhubungan.



Gambar : urutan pengujian kendaraan bermotor model BLU-e

Sumber : buletin profesi insinyur Paratiwi Sintya Maira

berikut perbedaan alur pengujian kendaran sebelum dan sesudah penggunaan metode pengujian kendaraan bermotor BLU-e



Gambar : perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan model BLU-e

Sumber: buletin profesi insinyur Paratiwi Sintya Maira

Penghitungan jumlah uji kelayakan kendaraan per hari

Guna untuk mendapatkan data yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk melihat bagaimana tingkat pelayanan perharinya di dinas perhubungan maka dapat dilakukan proses penghitungan jumlah kendaraan yang melakukan uji kelayakan kendaraan bermotor perharinya, untuk menghitung kapasitas uji berkala setiap harinya (Warsino dan Chandra, 2002) menggunakan Persamaan 1 sebagai berikut:

kp = Kapasitas pengujian unit PKB.

Th = Waktu kerja efektif unit PKB dalam satu hari (menit) yaitu 8 jam sehari dengan istirahat 1 jam sehingga waktu kerja efektif (7 jam atau 420 menit).

Tk1 = waktu yang diperlukan kendaraan pertama untuk diuji (menit) yaitu 30 menit.

Tr = Rata-rata waktu (tiap kendaraan keluar dari gedung uji) (menit) yaitu 15 menit.

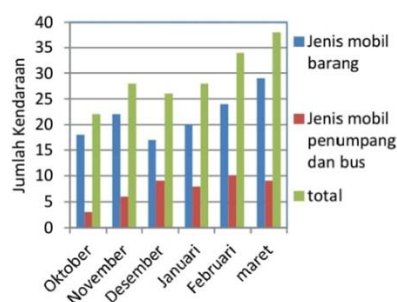
Maka:

Tapi ini bukanlah angka yang pasti, menurut bapak Afrizon ketika di wawancara, "Tidak ada angka pasti tentang jumlah kendaraan yang melakukan pemeriksaan, kalau dilihat dari waktu pemeriksaan kendaraan efektifnya hanya 15 menit per kendaraan" (wawancara 29 agustus 2024).

Jumlah pengujian kendaraan perharinya juga tidak selalu sama, karena beberapa faktor seperti jumlah pengendara yang memeriksakan kendaraan dalam 1 hari tidak selalu sama atau pun terkendala konektivitas jaringan internet juga memperlambat proses inspeksi. Menurut bapak Afrizon "ketika proses pemeriksaan kendaraan berlangsung inspeksi dapat berlangsung hanya dalam 5 menit, setelah data di upload paling supir hanya menunggu waktu 10 menit untuk bukti lulus selesai di cetak" (wawancara 29 agustus 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada proses penyelenggaraan pelayanan PKB di DISHUB Agam berhasil mencapai target dari peningkatan efektivitas pelayanan.

Jika dilihat pada gambar 4.13 terjadi beberapa kali peningkatan dan penurunan jumlah kendaraan yang dapat terjadi karena kondisi tertentu seperti ramai sepi nya konsumen pengguna layanan uji kendaraan bermotor.



Gambar : rata-rata jumlah kendaraan yang di uji setiap bulan per 2021 oktober – 2022 maret

Sumber:buletin profesi Ir. Paratiwi Sintya Maira

Tujuan di laksanakan uji kelayakan kendaraan bermotor

Setiap kendaraan bermotor harus menjalankan uji kelayakan kendaraan yang dilaksanakan oleh DISHUB setempat. Hal ini bertujuan untuk memastikan kelayakan kendaraan untuk berjalan di jalan umum. Oleh karena itu, tujuan dari uji kelayakan kendaraan bermotor ini adalah memastikan keselamatan penggunaannya di jalan.

Pengujian kendaraan bermotor di unit PKB dilakukan oleh tim Penguji yang memenuhi persyaratan sebagai penguji dan memegang teguh keputusan yang dikeluarkan pemerintah. Setelah menyelesaikan pengujian, kendaraan akan diberikan stiker hologram sebagai Bukti Lulus Uji. Dan pemilik kendaraan diberikan sebuah smartcard yang bisa di scan untuk mempermudah petugas ketika ada pemeriksaan di jalan. Pada saat melakukan wawancara dengan salah satu supir kendaraan (truck) Pak Rizki membenarkan pernyataan ini "kalau dulu pemeriksaan lebih lama, sekarang pemeriksaan sebentar, paling petugas melakukan scan ke barcode tunggu sebentar bisa langsung kami jalan" (wawancara pada 30 Agustus 2024)

Tujuan dari pengujian kelayakan Kendaraan Bermotor adalah untuk:

1. Memberikan jaminan secara teknis kepada pengguna kendaraan bermotor atas keselamatan pengendara.
2. Mewujudkan kelestarian dengan lingkungan oleh kemungkinan kendaraan yang tidak lulus pada saat uji emisi gas buang
3. Berfungsi sebagai pelayanan umum bagi masyarakat

Akan tetapi jika dilihat berdasarkan kejadian aktual di lapangan hal ini tidak selalu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, karena selain kelayakan kendaraan, ada beberapa faktor lain yang menjadi penentu terjadinya sebuah kecelakaan ketika berkendara seperti faktor lingkungan dan faktor pengendara. Menurut Lingga selaku staff penguji PKB "banyak kejadian kendaraan yang tidak layak pakai tapi masih digunakan tanpa melakukan uji PKB, entah itu alasannya kendaraan hanya digunakan di sekitar wilayah kampung, atau kendaraan tidak sering jalan oleh pengendaranya" (wawancara pada 29 Agustus 2024)

Dalam kondisi tertentu seperti beberapa wilayah yang rawan kecelakaan seperti jalanan yang memiliki pendakian yang panjang, wilayah yang berdekatan dengan jurang atau jalan lurus yang panjang yang berada di wilayah padat penduduk bisa menjadi faktor yang menyebabkan kecelakaan. Kemudian juga jika dilihat dari faktor yang disebabkan oleh pengendara itu sendiri dapat terjadi akibat kelalaian dalam berkendara, berkendara dalam kondisi mengantuk atau tidak sehat, bahkan juga

berkendara dalam kondisi dipengaruhi obat-obatan tertentu. Sehingga meskipun tidak menjadi alasan utama pada tingkat keberhasilan DISHUB melaksanakan program BLU-e KIR, tetap saja tingkat kecelakaan kendaraan bermotor di suatu daerah dapat menjadi salah satu indikasi keberhasilan DISHUB dalam menjalankan programnya.

Berikut data kecelakaan lalu lintas di provinsi SUMBAR, yang didapat dari kepolisian SUMBAR yang di posting oleh Badan Pusat Statistik (BPS) di situs resmi BPS.

Kepolisian Resort	Data Kecelakaan Lalu Lintas yang Terjadi di Provinsi Sumatera Barat		
	2020	2021	2022
Kab. Kepulauan Mentawai	2	15	2
Kab. Pesisir Selatan	216	241	285
Kab. Solok	76	62	91
Kab. Sijunjung	80	80	64
Kab. Tanah Datar	75	96	134
Kab. Padang Pariaman	274	278	195
Kab. Agam	134	133	155
Kab. Lima Puluh Kota	66	75	74
Kab. Pasaman	115	134	148
Kab. Solok Selatan	32	35	41
Kab. Dharmasraya	88	114	109
Kab. Pasaman Barat	233	324	246
Kota Padang	598	705	689
Kota Solok	69	62	55
Kota Sawahlunto	28	35	22
Kota Padang Panjang	68	128	133
Kota Bukittinggi	169	162	184
Kota Payakumbuh	114	149	172
Kota Pariaman	117	145	157
Provinsi Sumatera Barat	2 554	2 973	2 956
Sumber : Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat			
Data dikutip dari Publikasi Provinsi Sumatera Barat dalam Angka			

Gambar: data jumlah kecelakaan kendaraan bermotor perdaerah Sumatera Barat tahun 2020-2022

Sumber : <https://BPS.go.id>

ketika diwawancari terkait dengan jumlah kecelakaan yang terjadi di Kabupaten agam terkait dengan efektivitas fungsi dari uji PKB Lingga membantah bahwa kenaikan angka kecelakaan akibat perubahan pelayanan uji PKB “ kecelakaan “ kecelakaan itu

banyak faktor terjadi nya, uji PKB ini bertujuan memastikan kalau kendaraan yang dibawa pengendara itu layak jalan dan aman bagi supir maupun pengguna jalan lainnya.” (wawancara pada 30 agustus 2024)

Pembahasan

BLU-e diatur dalam PM no 19 Tahun 2021 pasal 64 ayat 1 , tentang pengujian kendaraan bermotor. Sesuai dengan isi dari peraturan ini yakni secara umum pengujian kendaraan secara berkala jaminan secara teknis kepada setiap pengendara kendaraan bermotor atas keselamatan dirinya sesuai dengan Undang-undang no 22 tahun 2009 yang telah diatur bahwasanya keselamatan pengendara kendaraan adalah tanggung jawab pemerintah, mendukung kelestarian lingkungan dan juga menjalankan fungsi pelayanan.

Oleh karena itu jika dilihat dari fungsinya, pelayanan dinas perhubungan di bidang uji kelayakan kendaraan bermotor hampir mencapai tingkat efektivitas yang sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam indicator sebuah efektivitas. Yang kemudian hanya perlu terus melakukan peningkatan di bidang pelayanan dan inovasi serta memperdalam skill personal petugas penguji kendaraan bermotor yang akan mempermudah kinerja petugas di kedinasan terkait.

Di luar konteks internal kedinasan terdapat juga beberapa permasalahan eksternal. Seperti tingkat kesadaran masyarakat terhadap keselamatan pribadi, kepercayaan masyarakat terhadap transparansi kebijakan dan sebagainya.

- a. faktor yang mempengaruhi penerapan model BLU-e di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam

Jika dibandingkan dengan sistem Kendaraan Bermotor tradisional yang menggunakan bukti lulus uji yang terdiri dari kartu uji, sistem uji Kendaraan model BLU-e menawarkan lebih banyak kelebihan dan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Transparansi proses pembayaran akan memudahkan pengajuan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini dikarenakan semua data kendaraan yang telah mengalami pembayaran dan penukaran dapat diselesaikan dengan cepat melalui aplikasi, dan proses penyelesaian pembayaran di gedung Uji hanya dapat diselesaikan jika sudah ada konfirmasi pembayaran uji telah dibuat. Hampir setiap langkah proses uji dilakukan melalui media elektronik, sehingga memungkinkan penyampaian layanan yang lebih cepat dan efektif kepada masyarakat umum dengan waktu uji yang lebih cepat.

2. Memudahkan pekerjaan staf pemeliharaan, staf administrasi, dan pemeriksa kendaraan bermotor. Karena setiap tahapan proses uji berkala terkandung dalam satu aplikasi yang sudah terintegrasi, maka tidak diperlukan lagi transfer data manual yang membosankan dan menyita banyak waktu dan tenaga; hal ini membuat pengoperasian sistem uji berkala dengan Blue menjadi sangat sederhana;
3. mempermudah pengawasan di lapangan dan mengkas birokrasi. Pada akhirnya, analisis hasil uji dilakukan secara manual, namun juga melibatkan pertimbangan yang cermat atas kesalahan yang dilakukan oleh penguji kendaraan bermotor, Dinas Perhubungan atau bahkan Dirjen Perhubungan.
4. Kementerian Perhubungan juga bisa melakukan pengawasan secara mudah aufgrund terhadap data kendaraan yang dikirimkan setiap hari tanpa henti dan diakses melalui aplikasi.
5. Menertibkan pemalsuan. Hal ini disebabkan karena setiap Bukti Lulus Uji Elektronik yaitu sertifikat hasil uji, smartcard, dan stiker terdapat barcode yang jika dipindai akan muncul pada data kendaraan yang telah diteruskan ke Departemen Perhubungan. Hanya hasil smartcard dan uji yang dapat diverifikasi menggunakan printer khusus, yang hanya dapat diperoleh melalui ID dari Kementrian Perhubungan. Nomor seri dan sidik jari kartu pintar bersifat unik sehingga sulit untuk diduplikasi.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam suksesnya penerapan model BLU-e di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam

Pada penerapannya, penerapan model BLU-e ini pada pelayanan pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor di dinas perhubungan Kabupaten Agam walaupun telah berjalan selama 3 tahun, masih belum mencapai titik optimal. Masih belum mencapai target yang telah di tetapkan seperti yang telah disebutkan menjadi keuntungan di atas. Banyak hal menjadi faktor penghalang kesuksesan penerapan model ini di DISHUB manapun, tidak hanya di Kabupaten Agam saja. Faktor penghambat kesuksesan sistem BLU-e atau E- KIR ini secara garis besar dapat di bagi menjadi 2 yakni faktor internal dan faktor eksternal.

Faktor internal yang menjadi penghambat penerapan model BLU-e ini menurut pengamatan peneliti antara lain :

1. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang masih harus terus ditingkatkan di dinas perhubungan, ini menjadi salah satu kunci dari belum nya tercapai sasaran penerapan dari model BLU-e ini, hal ini tidak selalu terkait skill dan kemampuan seorang sebagai petugas pelayanan, juga terkait transparansi, efektifitas kerja serta etos kerja.
2. Kemudian sarana juga prasarana yang kurang memadai, dalam prinsipnya pelayanan PKB diwajibkan memiliki peralatan yang minimal mumpuni untuk melakukan pemeriksaan kendaraan, sehingga hasil uji dari sebuah kendaraan di dapat secara akurat, terkait hal ini juga SDM seharusnya juga memiliki kemampuan dalam pengoperasian sarana dan prasarana yang tersedia.
3. Pengembangan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor, pada saat ini dengan penerapan model BLU-e ini memang mempermudah dan mempersingkat waktu pengujian kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi kunci permasalahannya adalah jumlah kendaraan bermotor yang semakin lama kian meningkat.

Faktor eksternal yang menghambat penerapan model BLU-e in menurut pengamatan peneliti :

1. Faktor utama yang menjadi penghambat yakni adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap faktor keselamatan pribadi maupun orang lain, pemeriksaan kelayakan kendaraan bermotor ini pada dasarnya ditujukan untuk memastikan kendaraan yang digunakan oleh masyarakat pada saat di kendarai berada di kondisi yang baik sehingga di harapkan dapat menghindari kecelakaan akibat penggunaan kendaraan tak layak pakai. Seperti pada gambar 1.



Gambar : kendaraan umum kurang layak pakai

Sumber : TribunPadang.com

2. Masih banyak masyarakat yang lebih memilih mnggunakan jasa calo, hal ini tentunya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, bukan kepada instansi

terkait melainkan ke program yang di terapkan instansi terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan Kabupaten Agam.

3. Masih terkait dengan poin faktor eksternal pada poin no 2, pada dasarnya memang untuk melakukan pemalsuan pada smartcard BLU-e sangat sulit dilakukan sehingga terjamin keasliannya, namun dalam proses memperoleh smartcard yang mana jika masyarakat masih menggunakan jasa calo tentu saja kelayakan kendaraan yang di gunakan masih di ragukan untuk dapat di gunakan di jalan raya.

Pada dasarnya pada penerapan model BLU-e KIR ini jika dilihat melalui sudut pandang fungsi dan tujuan diterapkannya model ini sudah sesuai dengan penerapannya, yang menjadi kekurangan dalam pelaksanaannya juga terbilang masih terus dapat di kembangkan, dengan adanya upgrade pada sarana dan prasarana, melakukan pelatihan khusus bagi penguji kendaraan bermotor dan sebagainya yang akan menjadi PR berat bagi DISHUB menurut peneliti adalah tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran diri dalam masyarakat tentang pentingnya keselamatan di jalan bagi pengendara sehingga tercipta perasaan aman saat berkendara.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam terkait bagaimana efektivitas penerapan model BLU-e di Dinas Perhubungan Kabupaten Agam, dapat ditarik kesimpulan yaitu

1. Pada dasarnya penerapan model BLU-e ini sangat inovatif dan juga memiliki potensi yang sangat baik demi meningkatkan di bidang pelayanan kedinasan, hal ini karena dengan di implementasikannya sistem PKB model BLU-e ini dapat meningkatkan transparansi pelayanan, kualitas pelayanan, waktu pelayanan dan juga meningkatkan kinerja juga skill petugas yang bertugas di kedinasan terkait. Dari segi pemantauan juga dapat dilakukan oleh pusat dengan baik karena setiap data kendaraan yang telah di uji dan telah dinyatakan lulus uji kelayakan dapat di pantau secara terkomputerisasi oleh pusat, karena semua kendaraan yang lulus uji kelayakan akan segera di upload datanya ke database pusat. Juga dari pengguna layanan ini juga di permudah dengan produk dari model ini tidak lagi berbentuk surat, melainkan sudah berbentuk sticker kecil yang di tempel di kaca depan kendaraan dan juga smartcard yang barcode nya bisa di scan dengan mudah melalui smartphone pengguna yang hasilnya bisa langsung di alihkan ke

website yang telah disediakan DISHUB Agam. Juga selain itu selain pelayanan uji kelayakan kendaraan bermotor, juga bersifat terbuka dan transparan sehingga memudahkan pengajuan pendapatan asli daerah (PAD). Yang pada intinya penerapan model BLU-e ini tingkat keefektifitasannya hanya sedikit mengalami ketertinggalan dari keefektifitasan yang di harapkan.

2. Pada pelaksanaannya peningkatan pengujian kendaraan bermotor terbilang labil, jumlah uji kendaraan tidak terlalu terpengaruh pada proses pelayanan yang sekarang lebih cepat, karna jumlah kendaraan yang melakukan uji tidak selalu ramai, namun setelah di terapkannya pelayanan PKB model BLU-e KIR dapat mengatasi jumlah kendaraan yang akan melakukan pengujian pada hari-hari tertentu yang membludak, dengan pelayanan yang cepat jumlah pengujian tentunya juga meningkat dengan proses pengujian yang lebih cepat.
3. Yang menjadi faktor dalam pelaksanaan pengimplementasian program BLU-e KIR ini adalah seperti pada umumnya program ini terbilang program baru, sehingga pada kenyataan dilapangan masih di perlukan beberapa masukan dan imbuhan sehingga penerapan model BLU-e ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Diantara yang menjadi kelemahan adalah ada beberapa aspek terkait aspek internal dan eksternal, antara lain kemampuan SDM yang belum optimal, walaupun proses dari pelaksanaan PKB sangat terpangkas di bandingkan pada metode uji KIR konvensional, tapi masih terdapat kelemahan seperti skill dan kemampuan petugas dalam mengoptimalkan sarana dan prasarana yang belum optimal, transparansi yang menjadi kunci kelebihan dari penerapan model BLU-e kir ini masih belum tercapai, dan juga dari faktor eksternal masyarakat juga belum semuanya memiliki kesadaran diri melakukan pengujian kelayakan kendaraan bermotor secara mandiri masih harus terus di perhatikan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, pada topik pembahasan ini, peneliti dapat memberikan saran yakni:

Semoga dengan adanya penelitian ini bisa digunakan dalam pengembangan bagi aspek-aspek pembelajaran di perkuliahan yang di antara lain sesuai dengan topik yang peneliti bahas dalam penelitian kali ini yaitu Manajemen Pelayanan publik dan Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian saran yang bisa peneliti berikan kepada kedinasan terkait demi mencapai target yang di harapkan dalam pelayanan pengujian

kendaraan bermotor pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Agam perlu memperhatikan dan meningkatkan kualitas SDM guna mencapai keefektifan dalam melaksanakan pelayanan serta juga meningkatkan kualitas sarana dan prasarana sehingga tujuan yang yang ingin di laksanakan dapat tercapai. Dan terakhir bagi masyarakat agar lebih mengdepankan kesadaran diri akan pentingnya keselamatan dalam berkendara, yang mana walaupun pada pengimplementasiannya masih terdapat beberapa kendala, pada umumnya kebutuhan akan keselamatan berkendara sudah di fasilitasi oleh kedinasan terkait.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Arief Setiawan, "Studi Penentuan Nilai Ekuivalensi Mobil Penumpang (Emp) Berbagai Jenis Kendaraan Pada Ruas Jalan Utama Di Kota Palu", Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Transportasi, Vol. 1 No. 1, Januari 2011, H. 19.
- Abidin, Yunus. (2010). Strategi Membaca: Teori Dan Pembelajarannya. Bandung: Rizqi Press.
- Atika Farhani Dan M. Fachri Adnan. 2021. Efektivitas Pelayanan Dokumen Kependudukan Melalui Sistem Paduko. Vol 5 (1): Pp. 65-78. Doi: <https://doi.org/10.24036/jess.v5i1>
- Agustina,D.N., Dan Mulyadi. (2019). Pengaruh Debt To Equit Ratio. Total Asset Turn Over, Current Ratio, Dan Net Profit Margin Terhadap Pertumbuhan Laba Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia, Jurnal Akuntansi, 6.(1).
- Andi Dahlia dan Nurul Maulida. (2014). Studi Tentang Efektifitas Dalam Sosialisai Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Di Kelurahan Sempoja Selatan Kota Samarinda, Journal Ilmu Komunikasi 2. No. 1.
- Beni. 2016. Konsep Dan Analisis Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Era Ootomi. Jakarta Pusat: Taushia.
- Blima Oktaviastuti¹ Dan Handika Setya Wijaya, "Urgensi Pengendalian Kendaraan Bermotor Di Indonesia", Jurnal Rekayasa Teknik Sipil Universitas Madura Vol. 2 No. 1 Juni 2017, H.5
- Burhanudin .B. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelestarian Budaya Lokal Sebagai Sumber Belajar Siswa Sekolah Dasar. Jurnal Abdi Populika.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2019. Statistic E-commerce.
- Campbell. (1989). Riset Dalam Efektivitas Organisasi. Terjemahan Sahat Simamora.

Jakarta: Erlangga.

Danim, Sudarwan. (2004). *Motivasi Kepemimpinan Dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.

Deddy Mulyadi, "Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik Konsep Dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Bukti Untuk Pelayanan Publik", (Bandung : Alfabeta, 2018) H. 194

Dedy Saputra Dkk, "Kualitas Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pada Upt. Pengujian Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Tamiang Layang Kabupaten Barito Timur Kalimantan Tengah", *Jurnal Pubbis* : Vol. 5, No. 1, 2021, H. 33